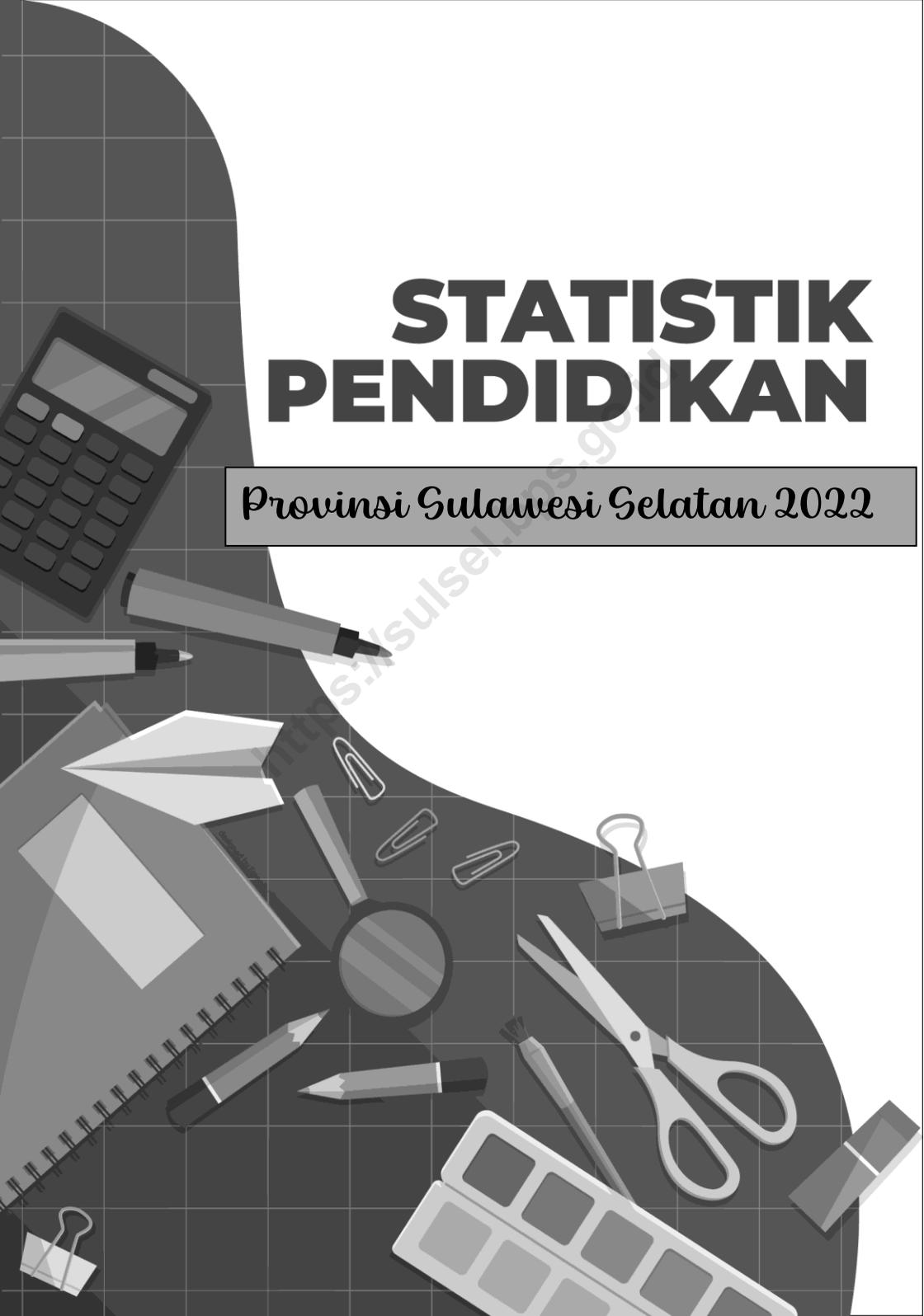


# STATISTIK PENDIDIKAN

*Provinsi Sulawesi Selatan 2022*



# STATISTIK PENDIDIKAN

Provinsi Sulawesi Selatan 2022



# STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2022

No. Publikasi: 73000.2320

Katalog: 4301002.73

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: x + 68 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Cover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi:

Freepik – Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan





## Tim Penyusun

### Penanggung Jawab Umum

Aryanto

### Penanggung Jawab Teknis/Editor

Kusmiati

### Penulis

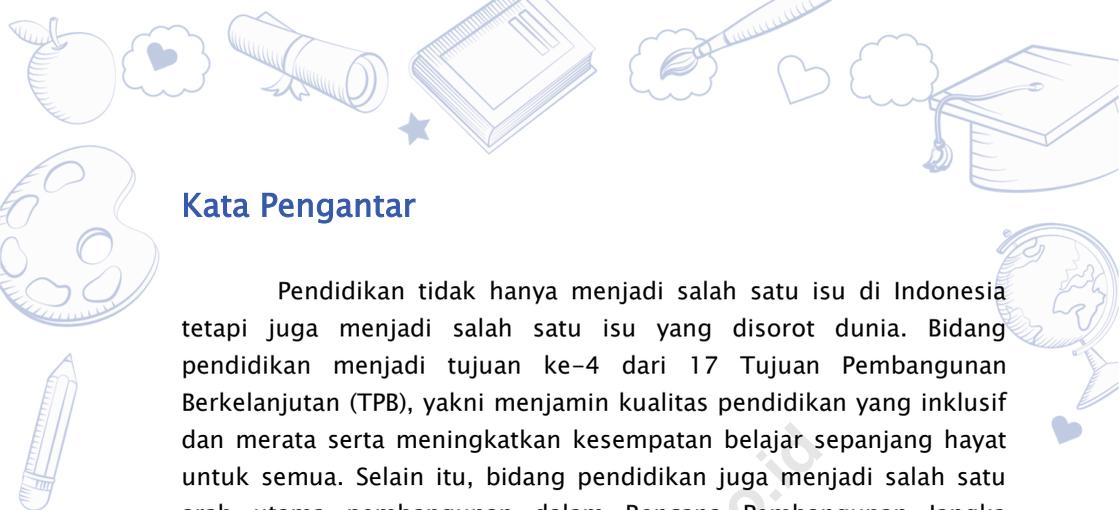
Ika Musvita Baso

Muh. Mustakim Hasma

<https://sulsel.bps.go.id>







## Kata Pengantar

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Bidang pendidikan menjadi tujuan ke-4 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022—2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Publikasi ini menggambarkan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Susenas Maret 2022. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Informasi dasar yang disajikan diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan angka buta huruf.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Makassar, April 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Selatan

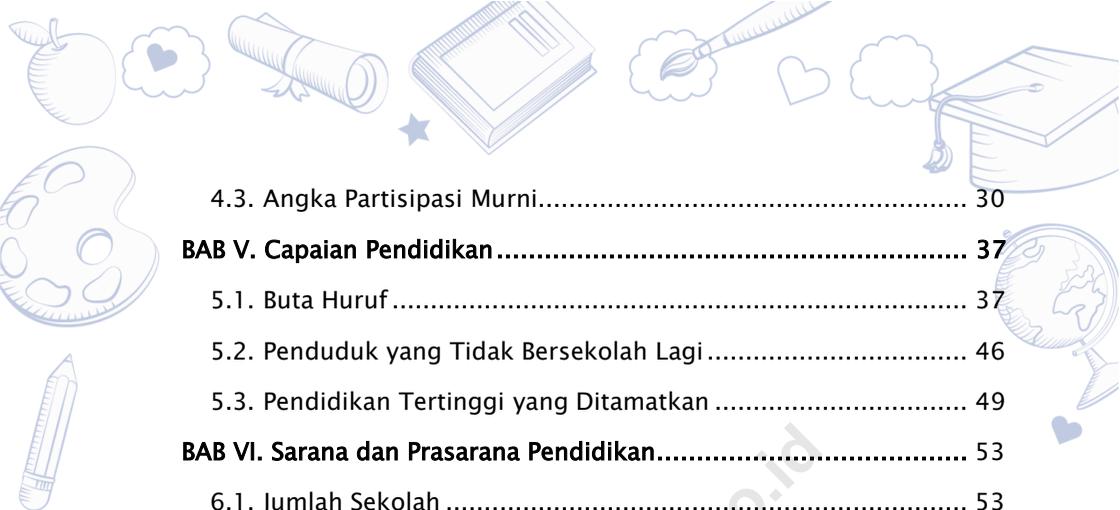


**Aryanto**



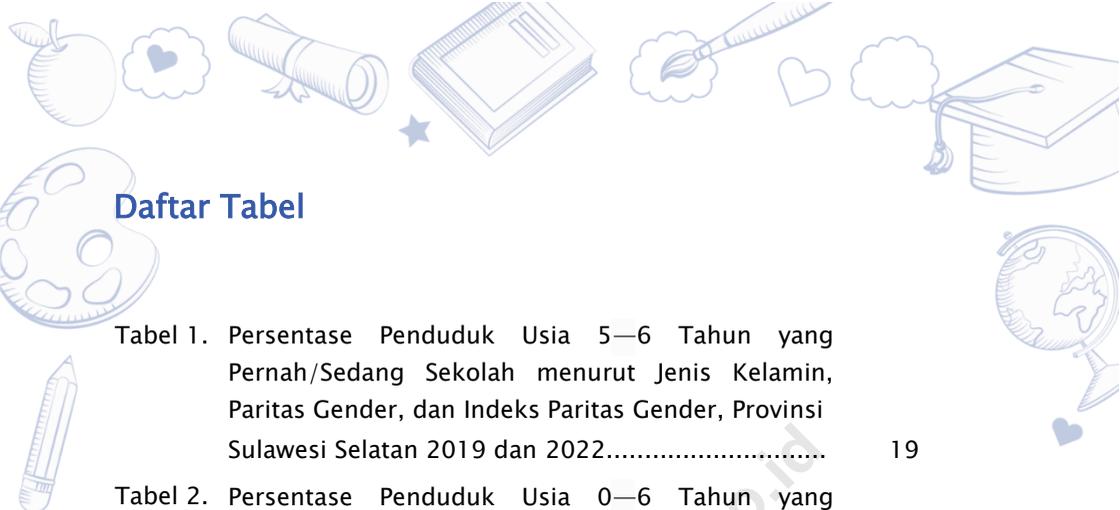
## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Sumber Data.....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. Metodologi.....</b>	<b>7</b>
2.1. Ruang Lingkup .....	7
2.2. Kerangka Sampel .....	8
2.3. Rancangan Sampel.....	8
2.4. Metode Pengumpulan Data .....	9
2.5. Pengolahan Data.....	10
<b>BAB III. Konsep dan Definisi .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB IV. Partisipasi Sekolah .....</b>	<b>17</b>
4.1. Angka Partisipasi Sekolah .....	17
4.1.1. Partisipasi Siswa pada PAUD.....	17
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP, dan SMA.....	21
4.2. Angka Partisipasi Kasar.....	26



4.3. Angka Partisipasi Murni.....	30
<b>BAB V. Capaian Pendidikan.....</b>	<b>37</b>
5.1. Buta Huruf.....	37
5.2. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi.....	46
5.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	49
<b>BAB VI. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....</b>	<b>53</b>
6.1. Jumlah Sekolah.....	53
6.2. Jumlah Guru.....	56
6.3. Jumlah Murid.....	59
6.4. Rasio Murid terhadap Rombongan Belajar dan Guru.....	63
<b>BAB V. Penutup.....</b>	<b>67</b>
7.1. Kesimpulan.....	67

<https://sulsel.bps.go.id>



## Daftar Tabel

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 5—6 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah menurut Jenis Kelamin, Paritas Gender, dan Indeks Paritas Gender, Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dan 2022.....	19
Tabel 2. Persentase Penduduk Usia 0—6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dan 2022 .....	20
Tabel 3. Angka Partispasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022.....	23
Tabel 4. Angka Partispasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dan 2022.	27
Tabel 5. Angka Partispasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022.....	32
Tabel 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dan 2022.....	41
Tabel 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 .....	45

Tabel 8. Persentase Penduduk Usia 7—18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 .....	47
Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 7—18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, Klasifikasi Daerah, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022.....	48
Tabel 10. Jumlah Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Status Sekolah, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2019/2022 .....	54
Tabel 11. Jumlah Guru menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2019/2022 .....	57
Tabel 12. Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2019/2022 .....	60
Tabel 13. Jumlah dan Rasio Murid dan Rombongan Belajar menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2019/2022 .....	63
Tabel 14. Jumlah dan Rasio Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2019/2022 .....	64



## Daftar Gambar

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7—18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 .....	21
Gambar 2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022.....	40
Gambar 3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 .....	43
Gambar 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dalam Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungan jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatrit dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, yakni SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yakni SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma,

sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin, 1996:24). Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Di samping sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah sekolah serta kuantitas dan kualitas guru, berbagai hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait.

Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi. Terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang memengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antarpenduduk di daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kultur sosial dan budaya yang berbeda antardaerah juga masih cukup kuat memberi warna terhadap kesempatan memperoleh pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun bagi penduduk perempuan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan serta penentuan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang

pendidikan mendapat perhatian serius pemerintah daerah Sulawesi Selatan, dengan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan, pemerintah perlu mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Sulawesi Selatan bersaing dalam tataran global.

Beberapa indikator pendidikan disajikan dalam publikasi “*Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2022*” sebagai gambaran dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan di bidang pendidikan. Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Selain itu, digunakan data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2019/2022.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk/angka melek huruf), tingkat partisipasi sekolah yang meliputi angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi kasar (APK), serta tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan siswa menurut jenjang pendidikan dan partisipasi sekolah anak usia prasekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya Program Wajib Belajar 12 Tahun dan penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM).

## 1.2. TUJUAN

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan,

dan status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Menyediakan data dasar pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan; dan
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengevaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

### **1.3. SUMBER DATA**

Data dan informasi pendidikan bersumber dari Susenas Kor Maret 2022. Susenas merupakan survei semseteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Sampel Susenas Provinsi Sulawesi Selatan tersebar di 24 kabupaten/kota yang mencakup 15.298 rumah tangga baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Selain itu, data sekunder mengenai pendidikan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2019/2022.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2022 tersusun atas tujuh bab, dilengkapi tabel–tabel lampiran dengan sistematika;

- BAB I. PENDAHULUAN**, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II. METODOLOGI**, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.
- BAB III. KONSEP DAN DEFINISI**, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.
- BAB IV. PARTISIPASI SEKOLAH**, meliputi Partisipasi Siswa pada Pendidikan Prasekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).
- BAB V. CAPAIAN PENDIDIKAN**, meliputi Angka Melek Huruf, Angka Buta Huruf, Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.
- BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**, meliputi Jumlah Sekolah, Jumlah Pendidik, Jumlah Siswa, dan Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru.
- BAB VII. PENUTUP**, meliputi Kesimpulan.

## BAB II

### METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

#### 2.1. RUANG LINGKUP

Susenas Maret 2022 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus<sup>1</sup> khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di dalam blok sensus biasa. Jumlah sampel Susenas Maret 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 15.300 rumah tangga, tersebar dalam 1.530 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel tersebut dicacah dengan kuesioner VSEN20.K dan VSEN20.KP. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan,

---

<sup>1</sup>Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

## 2.2. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel induk atau sampling frame induk kegiatan Susenas, Sakernas, dan Supas 2015 adalah sekitar 288.000 blok sensus (40 persen populasi) yang ditarik secara *probability proportional to size* (PPS)<sup>2</sup> dengan ukuran jumlah rumah tangga Sp2010 dari *master frame* blok sensus. Selanjutnya untuk kegiatan Susenas didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 40 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. Sebanyak 40 persen blok sensus tersebut disebut sampling *frame* induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

## 2.3. RANCANGAN SAMPEL

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022 dilaksanakan setiap semester. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Sampel rumah tangga untuk estimasi

---

<sup>2</sup>*Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu desain pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilitas terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar

kabupaten/kota dipilih dengan metode *two stage one phase stratified sampling* dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Memilih 40 persen blok sensus populasi secara PPS dengan *size* jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.

Tahap 2: Memilih sejumlah *n* blok sensus sesuai alokasi secara *systematic*<sup>3</sup> di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.

Tahap 3: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga (KRT).

#### 2.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data Susenas dilaksanakan pada Maret 2022. Sampel total Susenas Maret 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 15.300 rumah tangga. Pengumpulan data dari rumah tangga sampel terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden oleh petugas pencacah. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

---

<sup>3</sup>*Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir kepala rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pendidikan terakhir.

## 2.5. PENGOLAHAN DATA

Proses pengolahan data meliputi tahap perekaman data, pemeriksaan konsistensi antarisian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dan jawaban lainnya. Proses perekaman data dilakukan di BPS kabupaten/kota.

<https://sulsel.bps.go.id>

## BAB III

### KONSEP DAN DEFINISI

Pembatasan kerangka berpikir dibuat untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. **Pendidikan prasekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Contoh satuan pendidikan prasekolah pada **jalur pendidikan formal** adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Contoh satuan pendidikan prasekolah pada **jalur pendidikan nonformal** adalah PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

2. **Mengikuti pendidikan prasekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan prasekolah.
3. **Dapat membaca dan menulis** artinya jika seseorang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a - z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya

(contoh: huruf jawa, kanji, dll). **Kalimat sederhana** adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Seorang tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya tidak digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis.

4. **Bersekolah** adalah apabila seseorang **terdaftar dan aktif** mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal.
5. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
  - a. **Jenjang pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan madrasah Tsanawiyah (MTs).
  - b. **Jenjang pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemendikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  - c. **Jenjang pendidikan tinggi** merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi:
    - **Pendidikan akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang

ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.

- **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma 2 (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
- **Pendidikan Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain: program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur profesional pratama, madya dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

6. **Jenjang pendidikan nonformal** yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara

SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26).

7. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
8. **Masih bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
9. **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
10. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
11. **Angka partisipasi sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu.
12. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

13. **Angka partisipasi kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

<https://sulsel.bps.go.id>



## **BAB IV**

### **PARTISIPASI SEKOLAH**

#### **4.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH**

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan ke dalam APS.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7–12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13–15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16–18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

##### **4.1.1. PARTISIPASI SISWA PADA PAUD**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syarat motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan, akan tumbuh

dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak pada masa mendatang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. (Hilary Clinton, 1998).

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2022 menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak usia 5–6 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 21,66 persen. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 anak usia 5–6 tahun, terdapat lebih dari 22 orang yang sudah mengikuti pendidikan formal. Ini berarti belum optimalnya program pemerintah yang menerapkan aturan bahwa batas minimum umur anak untuk mengikuti sekolah formal SD adalah 7 tahun. Berbeda halnya dengan partisipasi prasekolah untuk anak usia 0–6 tahun, yakni mencapai 23,43 persen, mengalami penurunan dari tahun lalu.

Dilihat dari Paritas Gender (PG) yang merupakan selisih antara penduduk laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa nilai PG partisipasi anak usia 5–6 tahun di Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar -2,25 persen. Ini menandakan persentase anak perempuan umur 5–6 tahun yang mengikuti pendidikan lebih banyak dibandingkan anak laki-laki pada usia yang sama. Indikator kesenjangan lainnya adalah Indeks Paritas Gender (IPG) yang merupakan perbandingan capaian penduduk perempuan terhadap laki-laki. Pada tahun 2022, IPG Sulawesi Selatan menunjukkan nilai 1,11 persen yang berarti angka kesetaraan gender di Sulawesi Selatan berada sudah di atas ambang batas kesenjangan gender, yaitu persentase perempuan yang sekolah pada usia 5–6 tahun lebih banyak dibandingkan persentase laki-laki.

Tabel 4.1.1. Partisipasi Anak Usia 0–6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Provinsi Sulawesi Selatan 2021 dan 2022

Karakteristik	Partisipasi Sekolah	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	22,81	24.64
Perempuan	24,10	22.12
Tipe Daerah		
Perkotaan	22,48	24.18
Perdesaan	24,24	22.78
Total	23,74	23.43

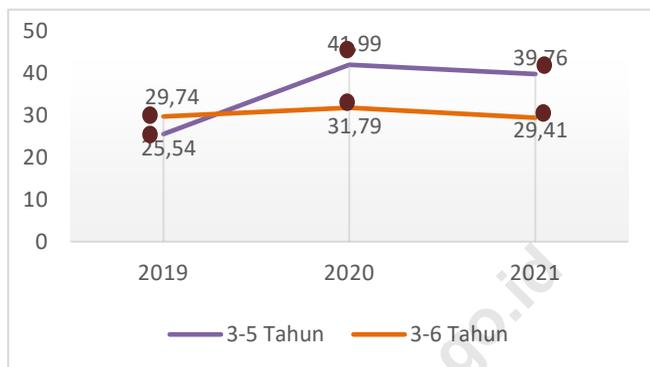
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021 dan 2022

Tabel 4.1.2. Partisipasi Anak Usia 5–6 Tahun yang Sedang/Pernah Sekolah menurut Jenis Kelamin, Paritas Gender, dan Indeks Paritas Gender, Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan 2021

Tahun	Partisipasi Sekolah			Paritas Gender	Indeks Paritas Gender
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	21,18	23,43	22,30	-2,25	1,11
2022	21.69	21.63	21.66	0,07	0,99

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022 dan 2021

Gambar 4.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Provinsi Sulawesi Selatan 2019–2021



Tabel 4.1.3. Partisipasi Anak Usia 0–6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dan 2022

Kabupaten	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Selayar	30.93	32.23	35.89	27.46	31.86
02. Bulukumba	32.49	24.79	28.25	26.25	27.29
03. Bantaeng	23.95	25.97	23.37	27.22	25.21
04. Jeneponto	23.70	25.07	23.49	25.92	24.75
05. Takalar	18.11	15.84	21.56	11.29	16.62
06. Gowa	18.94	18.91	21.77	15.99	18.92
07. Sinjai	20.12	33.89	29.60	30.00	29.78
08. Maros	25.07	25.62	24.89	25.95	25.38
09. Pangkep	22.24	22.72	24.02	21.01	22.58
10. Barru	35.52	34.89	30.52	39.86	35.14
11. Bone	36.46	21.02	27.62	23.27	25.47
12. Soppeng	26.95	22.79	20.88	28.01	24.22
13. Wajo	24.03	28.63	17.82	36.27	27.16
14. Sidrap	23.57	24.42	26.20	21.81	24.10
15. Pinrang	21.12	15.91	21.57	13.36	17.71
16. Enrekang	37.20	19.30	24.07	23.33	23.74
17. Luwu	16.33	18.91	17.27	19.67	18.38
18. Tana Toraja	36.27	27.44	30.68	27.92	29.41
22. Luwu Utara	23.44	25.14	26.78	22.84	24.81
25. Luwu Timur	20.94	19.30	21.78	17.54	19.82
26. Toraja Utara	22.68	18.16	15.17	23.70	19.46
71. Makassar	25.25	18.82	30.27	19.77	25.24
72. Parepare	16.52	4.13	14.88	17.79	16.28
73. Palopo	17.03	9.41	18.67	13.38	16.13
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>24.18</b>	<b>22.78</b>	<b>24.64</b>	<b>22.12</b>	<b>23.43</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021 dan Susenas Maret 2022

#### 4.1.2. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) SD, SMP DAN SMA

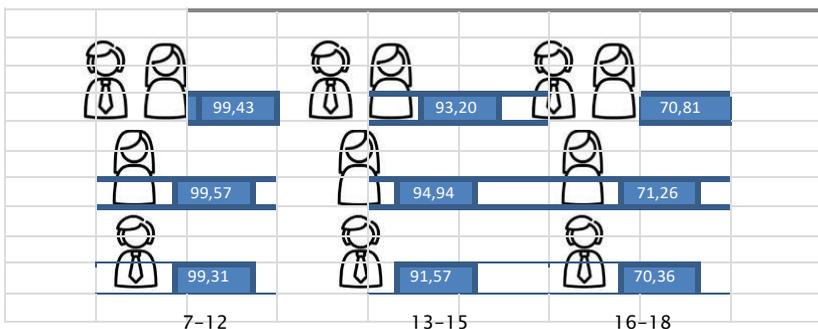
Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7–12 tahun), SMP (13–15 tahun), dan SMA (16–18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{APS SD} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APS SMP} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APS SMA} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7–18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2021 dan menggunakan formulasi diatas dapat disajikan pada **Gambar 1**. Pada **Gambar 1** terlihat bahwa APS SD sebesar 99,43 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7–12 tahun di Sulawesi Selatan sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada jenjang pendidikan SMP (13–15 tahun) baru mencapai 93,20 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan SMA (16–18 tahun), angka APS baru mencapai 70,81 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan yang mana hal tersebut menggambarkan bahwa kesetaraan gender dalam hal pendidikan sudah tercapai.

Mengkaji lebih dalam tentang APS, **Tabel 3** di bawah menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah 7–12 tahun, 13–15 tahun dan 16–18 tahun yang terjadi di kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

#### **A. APS USIA 7–12 TAHUN**

Secara umum, angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7–12 tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. APS SD Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 99,25 dan tahun 2022 sebesar 99,43 persen. Jika dilihat lebih rinci menurut kabupaten/kota, APS usia 7–12 tahun seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai lebih dari 98 persen. Tingginya angka APS di Sulawesi Selatan ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun sebagai upaya untuk pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup berhasil.

Tabel 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021

Kabupaten/Kota	APS 7–12			APS 13–15		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	97.25	100.00	98.60	92.10	91.39	91.74
02. Bulukumba	100.00	99.06	99.55	91.15	93.92	92.72
03. Bantaeng	99.95	100.00	99.98	96.52	92.07	94.58
04. Jenepono	99.83	99.84	99.83	93.32	83.06	88.15
05. Takalar	98.17	99.25	98.70	91.55	87.90	89.70
06. Gowa	99.27	99.93	99.58	96.06	97.27	96.67
07. Sinjai	100.00	98.57	99.31	87.42	97.87	92.61
08. Maros	100.00	99.44	99.71	92.03	98.99	95.15
09. Pangkep	99.88	99.59	99.73	87.85	96.92	91.72
10. Barru	100.00	98.70	99.38	91.68	96.29	94.01
11. Bone	97.70	100.00	98.75	89.05	95.53	92.31
12. Soppeng	99.59	98.80	99.19	85.56	98.74	92.02
13. Wajo	100.00	99.39	99.70	85.23	82.50	84.01
14. Sidrap	98.49	98.51	98.50	87.93	93.53	90.68
15. Pinrang	100.00	99.27	99.63	83.93	99.73	90.63
16. Enrekang	99.33	99.98	99.67	95.95	98.04	97.00
17. Luwu	99.33	100.00	99.67	94.80	89.41	92.64
18. Tana Toraja	99.05	100.00	99.53	98.37	94.26	96.37
22. Luwu Utara	100.00	99.98	99.99	92.91	92.92	92.90
25. Luwu Timur	99.66	100.00	99.82	94.41	100.00	96.93
26. Toraja Utara	100.00	97.04	98.56	97.81	96.76	97.37
71. Makassar	99.26	100.00	99.62	89.22	97.46	93.34
72. Parepare	100.00	99.11	99.57	92.66	92.19	92.41
73. Palopo	98.23	99.20	98.68	96.77	100.00	98.46
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>99.31</b>	<b>99.57</b>	<b>99.43</b>	<b>91.57</b>	<b>94.94</b>	<b>93.20</b>
<b>2021</b>	99.03	99.56	99.29	92.10	95.02	93.55

Lanjutan Tabel 3

Kabupaten/Kota (1)	APS 16-18		
	L (8)	P (9)	L + P (10)
01. Kep. Selayar	62.02	68.88	64.99
02. Bulukumba	74.79	73.92	74.39
03. Bantaeng	61.67	50.00	56.81
04. Jenepono	67.31	60.21	63.89
05. Takalar	63.53	68.24	65.99
06. Gowa	70.61	71.21	70.91
07. Sinjai	70.53	73.13	71.72
08. Maros	70.80	70.87	70.84
09. Pangkep	57.92	75.23	66.43
10. Barru	72.09	69.51	70.73
11. Bone	58.27	68.20	63.44
12. Soppeng	75.75	79.68	77.72
13. Wajo	55.20	70.03	62.81
14. Sidrap	70.97	66.44	68.92
15. Pinrang	78.96	67.67	73.59
16. Enrekang	68.29	91.01	78.86
17. Luwu	69.84	72.64	71.22
18. Tana Toraja	84.57	69.59	77.36
22. Luwu Utara	75.97	68.14	72.13
25. Luwu Timur	62.05	76.74	70.11
26. Toraja Utara	72.54	86.13	79.37
71. Makassar	78.44	67.92	73.03
72. Parepare	62.78	84.75	73.05
73. Palopo	79.87	88.35	84.59
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>70.36</b>	<b>71.26</b>	<b>70.81</b>
<b>2021</b>	<b>69.26</b>	<b>73.12</b>	<b>71.21</b>

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

## B. APS USIA 13–15 TAHUN

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun capaiannya tidak secemerlang APS SMP meskipun mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. APS Sulawesi Selatan tahun 2021 masih berada di angka 93,55 persen. APS Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 93,20. Pada tahun 2022 pada umumnya APS kabupaten/kota mencapai lebih dari 90 persen. Namun terdapat kabupaten yang APS-nya kurang dari 90 persen yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo. Pencapaian APS ini tentu tidak terlepas dari program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dilihat dari sisi gender, APS perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua dari sisi pendidikan hampir setara antara laki-laki maupun perempuan.

## C. APS USIA 16–18 TAHUN

Seiring dengan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun, APS usia 16–18 tahun juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. APS SMA Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai 70,81 persen. Meskipun perhatian pemerintah daerah sudah cukup serius pada bidang pendidikan, namun pada kelompok umur ini, APS yang dicapai kabupaten/kota masih berada di kisaran 56 hingga 84 persen. Kabupaten Bantaeng mempunyai angka APS SMA yang terendah yaitu 56, persen. Rendahnya APS usia 16–18 tahun Sulawesi Selatan mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan pada tahun-tahun yang akan datang. Dilihat dari sisi gender, dari tahun ke tahun APS usia 16–18 tahun untuk perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki.

## 4.2. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD, SMP DAN SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.

Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{APK SD} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang masih Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang masih Bersekolah di SLTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang masih Bersekolah di SLTA}}{\left( \text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun} \right)} \times 100\%$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2022 dan menggunakan formulasi diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Kabupaten/Kota	APK 7-12			APK 13-15		
	L	P	L + P	L	P	L + P
01. Kep. Selayar	107.78	109.93	108.83	93.23	82.90	87.97
02. Bulukumba	118.09	108.11	113.27	82.93	89.16	86.46
03. Bantaeng	121.06	110.56	115.35	80.55	77.15	79.07
04. Jeneponto	107.91	113.01	110.14	91.19	77.22	84.15
05. Takalar	105.46	109.57	107.50	96.10	81.18	88.57
06. Gowa	108.08	108.76	108.40	84.79	79.88	82.31
07. Sinjai	108.02	108.87	108.43	75.42	103.06	89.20
08. Maros	114.08	106.87	110.38	94.50	87.08	91.18
09. Pangkep	105.85	104.20	104.98	80.35	85.77	82.66
10. Barru	106.47	99.56	103.23	96.77	86.16	91.41
11. Bone	100.43	106.02	102.99	90.09	94.19	92.15
12. Soppeng	106.40	106.80	106.60	87.88	93.74	90.75
13. Wajo	107.69	106.02	106.87	66.00	77.77	71.27
14. Sidrap	108.96	108.92	108.94	102.71	101.04	101.89
15. Pinrang	106.78	100.20	103.41	67.68	82.14	73.81
16. Enrekang	109.29	106.71	107.96	106.92	94.55	100.69
17. Luwu	108.68	104.61	106.58	79.64	80.23	79.87
18. Tana Toraja	112.02	104.98	108.51	94.41	79.27	87.03
22. Luwu Utara	110.90	101.61	106.24	76.09	90.97	82.86
25. Luwu Timur	112.58	107.16	110.02	89.68	98.34	93.59
26. Toraja Utara	115.68	106.55	111.22	85.25	97.97	90.70
71. Makassar	101.46	103.89	102.65	83.00	85.99	84.49
72. Parepare	108.64	112.52	110.53	83.01	72.09	77.27
73. Palopo	100.02	100.09	100.05	85.63	87.17	86.44
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>107.34</b>	<b>106.06</b>	<b>106.71</b>	<b>85.47</b>	<b>86.97</b>	<b>86.19</b>
<b>2021</b>						<b>86,23</b>

Lanjutan Tabel 4

Kabupaten/Kota	APK 16-18		
	L	P	L + P
(1)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Selayar	93.23	82.90	87.97
02. Bulukumba	82.93	89.16	86.46
03. Bantaeng	80.55	77.15	79.07
04. Jeneponto	91.19	77.22	84.15
05. Takalar	96.10	81.18	88.57
06. Gowa	84.79	79.88	82.31
07. Sinjai	75.42	103.06	89.20
08. Maros	94.50	87.08	91.18
09. Pangkep	80.35	85.77	82.66
10. Barru	96.77	86.16	91.41
11. Bone	90.09	94.19	92.15
12. Soppeng	87.88	93.74	90.75
13. Wajo	66.00	77.77	71.27
14. Sidrap	102.71	101.04	101.89
15. Pinrang	67.68	82.14	73.81
16. Enrekang	106.92	94.55	100.69
17. Luwu	79.64	80.23	79.87
18. Tana Toraja	94.41	79.27	87.03
22. Luwu Utara	76.09	90.97	82.86
25. Luwu Timur	89.68	98.34	93.59
26. Toraja Utara	85.25	97.97	90.70
71. Makassar	83.00	85.99	84.49
72. Parepare	83.01	72.09	77.27
73. Palopo	85.63	87.17	86.44
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>85.47</b>	<b>86.97</b>	<b>86.19</b>
<b>2021</b>			<b>86,44</b>

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Dari **Tabel 4**, terlihat bahwa APK SD di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebesar 106,71 persen, yang berarti selain penduduk berumur 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD, terdapat penduduk yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk tingkat pendidikan yang sama. Kondisi ini terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada 2022, APK SD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bantaeng, yaitu sebesar 115,35 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Makassar, yaitu sebesar 102,65 persen.

APK SMP mengalami penurunan, yaitu dari 86,23 persen di tahun 2021 menjadi 86,19 persen di tahun 2022. APK tertinggi dicapai oleh Kota Makassar yaitu sebesar 101,89 persen.

Penurunan APK SMA dari tahun 2021 dibandingkan tahun 2022, yakni dari 86,44 persen menjadi 86,19 persen. APK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Wajo sebesar 101,89 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Wajo 71,27 persen.

Tingginya APK pada jenjang pendidikan SD menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 6 tahunnya mengingat APK tidak memperhatikan umur dalam penghitungannya.

### 4.3. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD, SMP, DAN SMA

Selain APS dan APK, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk

pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{APM SD} = \left( \frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah SD Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APM SMP} = \left( \frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah SLTP Usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APM SMA} = \left( \frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah SLTA Usia 16 – 18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan di seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti terus bertambah. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan di seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti terus bertambah. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	97.25	100.00	98.60	85.28	75.21	80.15
02. Bulukumba	100.00	99.06	99.55	79.61	85.68	83.05
03. Bantaeng	99.95	100.00	99.98	74.96	67.08	71.52
04. Jeneponto	97.34	92.07	95.04	77.27	54.91	66.00
05. Takalar	98.17	99.25	98.70	80.49	66.69	73.51
06. Gowa	99.27	99.93	99.58	78.47	76.23	77.34
07. Sinjai	100.00	98.57	99.31	68.23	79.34	73.76
08. Maros	100.00	99.44	99.71	74.41	75.94	75.10
09. Pangkep	94.55	94.36	94.45	71.50	70.80	71.20
10. Barru	100.00	98.70	99.38	86.66	77.86	82.21
11. Bone	94.68	94.67	94.68	79.02	79.01	79.02
12. Soppeng	99.59	98.80	99.19	69.78	86.68	78.08
13. Wajo	100.00	99.39	99.70	63.36	66.99	64.98
14. Sidrap	98.49	98.51	98.50	75.77	78.06	76.89
15. Pinrang	100.00	99.27	99.63	67.68	79.32	72.62
16. Enrekang	99.33	99.98	99.67	82.63	79.43	81.02
17. Luwu	99.01	96.77	97.85	76.20	73.28	75.03
18. Tana Toraja	99.05	100.00	99.53	89.26	75.77	82.69
22. Luwu Utara	98.05	91.59	94.81	70.02	75.58	72.55
25. Luwu Timur	99.66	100.00	99.82	77.77	81.12	79.28
26. Toraja Utara	100.00	97.04	98.56	80.60	89.22	84.30
71. Makassar	99.26	100.00	99.62	80.12	85.99	83.05
72. Parepare	100.00	99.11	99.57	77.97	72.09	74.87
73. Palopo	98.23	99.20	98.68	79.65	81.30	80.51
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>98.64</b>	<b>98.18</b>	<b>98.41</b>	<b>77.07</b>	<b>77.79</b>	<b>77.42</b>
<b>2021</b>	<b>98,18</b>	<b>97,77</b>	<b>97,98</b>	<b>77,25</b>	<b>75,11</b>	<b>76,17</b>

Lanjutan Tabel 5

Kabupaten/Kota (1)	APM SMA		
	L (8)	P (9)	L + P (10)
01. Kep. Selayar	49.33	50.63	49.89
02. Bulukumba	68.02	63.58	65.94
03. Bantaeng	55.88	44.57	51.17
04. Jeneponto	57.48	45.31	51.63
05. Takalar	61.52	56.27	58.79
06. Gowa	62.02	58.76	60.37
07. Sinjai	70.53	68.13	69.45
08. Maros	67.62	65.53	66.55
09. Pangkep	55.05	61.60	58.27
10. Barru	60.83	64.67	62.85
11. Bone	48.70	57.34	53.19
12. Soppeng	74.84	64.38	69.58
13. Wajo	49.24	59.88	54.71
14. Sidrap	62.26	54.13	58.58
15. Pinrang	58.93	64.51	61.58
16. Enrekang	56.25	85.11	69.67
17. Luwu	65.96	64.52	65.25
18. Tana Toraja	47.62	58.00	52.62
22. Luwu Utara	60.33	62.81	61.54
25. Luwu Timur	54.09	68.42	61.95
26. Toraja Utara	63.48	73.31	68.42
71. Makassar	65.68	53.94	59.64
72. Parepare	54.68	75.14	64.27
73. Palopo	68.46	68.84	68.68
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>60.54</b>	<b>60.34</b>	<b>60.44</b>
<b>2021</b>	<b>59,60</b>	<b>61,06</b>	<b>60,32</b>

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

## A. APM SD

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2022, APM SD di Sulawesi Selatan mencapai 98,41 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021. Pada **Tabel 4** terlihat jelas perbedaan angka APM Sulawesi Selatan dari tahun 2022 antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan waktu, perbedaan APM SD antara laki-laki dan perempuan semakin berkurang. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7–12 tahun yang sedang duduk di SD.

## B. APM SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 76,17 persen di tahun 2022 menjadi 77,41 di tahun 2022. Peningkatan APM SMP ini terjadi setengah dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari sisi gender, APM SMP tidak menunjukkan perbedaan jauh antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan sudah mulai terbuka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang dalam menuntut pendidikan. Artinya, kesempatan bersekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun.

## C. APM SMA

Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP, pada tahun 2022 APM SMA Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 APM SMA mencapai 60,32 persen, meningkat menjadi 60,44 persen pada 2022. Meskipun APM SMA terendah dibandingkan APM kelompok lainnya,

namun peningkatan APM SMA ini dapat menggambarkan peningkatan pencapaian program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

<https://sulsel.bps.go.id>



## BAB V

### CAPAIAN PENDIDIKAN

#### 5.1. BUTA HURUF

Buta huruf adalah kondisi seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya seperti huruf jawa, kanji, dll. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka Buta Huruf (ABH) penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong buta huruf terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kegunaan angka tersebut adalah sebagai:

1. Alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih buta huruf;
2. Tolak ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf; dan
3. Alat untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta

huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran (Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No 1 Tahun 2019).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Salah satu target dalam Tujuan 4, yakni Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Salah satu indikator dalam Tujuan 4 adalah 4.6.1.(a) persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas. Indikator tersebut merupakan indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Dalam Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023, Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target sebesar 94,30 persen pada 2022 dan sebesar 94,94 persen pada 2021 untuk indikator TPB tersebut. Sebagai bagian dari dunia global, Sulawesi Selatan juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Dalam Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial disebutkan bahwa AMK merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator tersebut kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur

kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. AMH dan ABH merupakan indikator yang nilainya saling berbanding terbalik. Semakin tinggi AMH suatu wilayah berarti ABH akan semakin rendah.

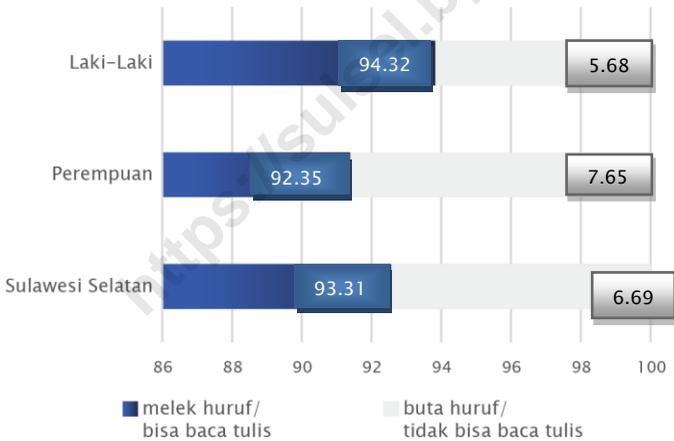
Pada 2022 tercatat penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 93,31 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 6,61 persen agar target pada 2021 terpenuhi. Budaya literasi harus ditingkatkan karena merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, paket C, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik. Pada 2022, terdapat sebanyak 6,69 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan yang masih buta huruf. Pada **Gambar 2** tersaji potret kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada 2022, persentase penduduk perempuan yang buta huruf masih lebih banyak daripada persentase penduduk laki-laki yang buta huruf. Padahal, persentase penduduk laki-laki yang buta huruf mengalami penurunan dari tahun 2021 lalu dan persentase penduduk perempuan yang buta huruf juga mengalami penurunan. Penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis sebanyak 7,65 persen. Sedangkan penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa

baca tulis sebanyak 5,68 persen. Keadaan tersebut perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Sulawesi Selatan. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta huruf harus lebih ditingkatkan.

Gambar 2      Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Sulawesi Selatan 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Angka Buta Huruf					
	L		P		L+P	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
01. Kep. Selayar	5.84	5.35	6.24	8.40	6.05	6.92
02. Bulukumba	7.14	6.28	8.97	7.07	8.13	6.69
03. Bantaeng	13.43	11.76	14.11	15.50	13.79	13.66
04. Jenepono	12.16	17.71	17.10	20.61	14.76	19.19
05. Takalar	12.24	9.51	13.05	13.95	12.67	11.80
06. Gowa	8.27	7.32	10.79	10.58	9.57	8.98
07. Sinjai	10.07	10.31	11.18	10.46	10.66	10.38
08. Maros	6.05	7.94	11.91	12.73	9.09	10.35
09. Pangkep	5.79	2.96	10.90	5.38	8.47	4.21
10. Barru	8.00	9.25	10.98	12.31	9.58	10.83
11. Bone	7.15	7.14	10.23	8.17	8.80	7.68
12. Soppeng	7.21	6.80	8.41	9.09	7.86	8.01
13. Wajo	9.22	5.95	12.37	10.10	10.90	8.12
14. Sidrap	5.86	6.85	8.45	7.50	7.21	7.18
15. Pinrang	5.86	3.44	9.22	6.82	7.62	5.18
16. Enrekang	5.52	4.76	10.27	7.30	7.95	6.01
17. Luwu	4.97	2.83	7.12	4.59	6.09	3.71
18. Tana Toraja	7.84	6.06	11.47	8.02	9.66	7.00
22. Luwu Utara	5.21	2.27	8.59	4.97	6.91	3.61
25. Luwu Timur	3.40	7.13	5.76	7.46	4.55	7.29
26. Toraja Utara	7.24	5.85	9.75	8.10	8.51	6.95
71. Makassar	1.30	0.64	1.51	1.02	1.41	0.83
72. Pare Pare	1.46	1.01	3.17	2.13	2.33	1.58
73. Palopo	1.33	2.87	2.36	2.00	1.86	2.43
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>6.17</b>	<b>5.68</b>	<b>8.61</b>	<b>7.65</b>	<b>7.44</b>	<b>6.69</b>

Lanjutan Tabel 6.

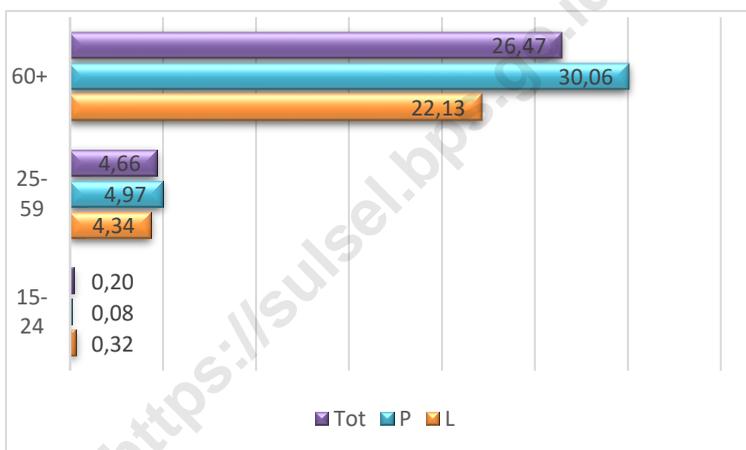
Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf					
	L		P		L+P	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
01. Kep. Selayar	94,16	94.65	93,76	91.60	93,95	93.08
02. Bulukumba	92,86	93.72	91,03	92.93	91,87	93.31
03. Bantaeng	86,57	88.24	85,89	84.50	86,21	86.34
04. Jeneponto	87,84	82.29	82,90	79.39	85,24	80.81
05. Takalar	87,76	90.49	86,95	86.05	87,33	88.20
06. Gowa	91,73	92.68	89,21	89.42	90,43	91.02
07. Sinjai	89,93	89.69	88,82	89.54	89,34	89.62
08. Maros	93,95	92.06	88,09	87.27	90,91	89.65
09. Pangkep	94,21	97.04	89,10	94.62	91,53	95.79
10. Barru	92,00	90.75	89,02	87.69	90,42	89.17
11. Bone	92,85	92.86	89,77	91.83	91,20	92.32
12. Soppeng	92,79	93.20	91,59	90.91	92,14	91.99
13. Wajo	90,78	94.05	87,63	89.90	89,10	91.88
14. Sidrap	94,14	93.15	91,55	92.50	92,79	92.82
15. Pinrang	94,14	96.56	90,78	93.18	92,38	94.82
16. Enrekang	94,48	95.24	89,73	92.70	92,05	93.99
17. Luwu	95,03	97.17	92,88	95.41	93,91	96.29
18. Tana Toraja	92,16	93.94	88,53	91.98	90,34	93.00
22. Luwu Utara	94,79	97.73	91,41	95.03	93,09	96.39
25. Luwu Timur	96,60	92.87	94,24	92.54	95,45	92.71
26. Toraja Utara	92,76	94.15	90,25	91.90	91,49	93.05
71. Makassar	98,70	99.36	98,49	98.98	98,59	99.17
72. Pare Pare	98,54	98.99	96,83	97.87	97,67	98.42
73. Palopo	98,67	97.13	97,64	98.00	98,14	97.57
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>93,83</b>	<b>94.32</b>	<b>91,39</b>	<b>92.35</b>	<b>92,56</b>	<b>93.31</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019 dan Susenas Maret 2022

Di **Tabel 6** menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis (melek huruf dan buta huruf). Tiga kabupaten yang mempunyai persentase penduduk yang buta huruf paling besar, yakni Kabupaten Jeneponto (19,19

persen), Bantaeng (13,66 persen) dan Takalar (11,80 persen). Sementara kabupaten/kota dengan persentase penduduk buta huruf paling rendah berturut-turut adalah Kota Makassar (0,83 persen) dan Kota Pare-pare (1,58 persen).

Gambar 3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok umur. Angka buta huruf menurut kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. **Gambar 3** menyajikan angka buta huruf menurut kelompok remaja (15–24

tahun), kelompok dewasa (25–59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas) di Sulawesi Selatan tahun 2022.

**Gambar 3** menunjukkan bahwa sebaran penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf sebagian besar berada pada kelompok lansia (60 tahun ke atas). Secara total (penduduk laki-laki dan penduduk perempuan), penduduk lansia yang buta huruf/buta aksara sebanyak 26,47 persen. Selanjutnya, penduduk dewasa yang buta aksara sebanyak 4,66 persen dan penduduk remaja yang buta aksara sebanyak 0,20 persen. Secara total, penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf cenderung menurun setiap tahunnya meskipun dilihat menurut kelompok umur.

Penduduk perempuan yang buta huruf baik kelompok lansia maupun kelompok dewasa masih lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang buta huruf. Meskipun demikian, remaja perempuan yang buta huruf pada 2022 lebih rendah dibandingkan remaja laki-laki. Hal tersebut dapat disebabkan semakin tingginya tingkat kesadaran remaja perempuan akan pentingnya pendidikan. Penduduk laki-laki yang buta huruf untuk semua kelompok umur mengalami kenaikan pada 2022. Kenaikan yang tinggi terjadi pada lansia laki-laki, yakni semula 22,84 persen (2021) menjadi 22,13 persen (2022).

Selanjutnya, pada **Tabel 7** disajikan penduduk buta huruf menurut kelompok umur yang dirinci hingga level kabupaten/kota. Jika dilihat menurut jenis kelamin dan atau secara total, persentase penduduk remaja yang buta huruf di sebagian besar kabupaten/kota sudah mencapai 0,20 persen. Yang perlu mendapat perhatian lebih adalah Kabupaten Selayar dan Kabupaten Bone karena angka buta huruf remajanya mencapai satu persen (jika dilihat menurut jenis kelamin dan atau secara total).

Tabel 7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan		
	15-24	25-59	60+	15-24	25-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	2.16	3.54	17.82	-	4.28	32.27
02. Bulukumba	0.30	5.07	21.20	0.14	5.18	24.09
03. Bantaeng	0.38	10.42	40.36	0.62	12.82	53.03
04. Jenepono	1.25	17.31	50.85	-	18.45	60.55
05. Takalar	0.20	7.81	34.76	-	10.25	50.21
06. Gowa	-	6.26	27.73	-	6.88	47.39
07. Sinjai	0.94	5.27	51.38	-	6.29	41.72
08. Maros	0.34	6.71	29.71	-	8.27	54.20
09. Pangkep	-	1.93	14.00	-	3.75	19.91
10. Barru	0.26	5.52	35.33	-	7.62	39.89
11. Bone	1.52	4.85	24.54	0.26	4.64	28.34
12. Soppeng	-	2.96	26.71	-	2.87	31.59
13. Wajo	0.42	3.51	22.78	0.44	5.64	35.00
14. Sidrap	-	4.66	26.90	-	2.94	31.88
15. Pinrang	-	1.97	16.66	-	3.30	29.94
16. Enrekang	0.14	3.29	20.56	-	4.72	27.46
17. Luwu	0.25	1.89	13.02	0.56	2.11	21.99
18. Tana Toraja	-	7.50	10.67	-	5.60	26.28
22. Luwu Utara	0.33	1.57	9.88	-	2.31	27.38
25. Luwu Timur	-	5.92	30.24	-	6.30	30.82
26. Toraja Utara	-	4.33	22.92	-	4.47	32.05
71. Makassar	-	0.17	4.92	-	0.61	5.25
72. Pare Pare	-	0.17	8.59	-	0.85	11.86
73. Palopo	-	2.02	15.45	0.10	1.17	10.17
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>0.32</b>	<b>4.34</b>	<b>22.13</b>	<b>0.08</b>	<b>4.97</b>	<b>30.06</b>

Lanjutan Tabel 7

Kabupaten/Kota	Laki-Laki+Perempuan		
	15-24	25-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kep. Selayar	1.10	3.93	25.96
02. Bulukumba	0.22	5.12	22.76
03. Bantaeng	0.50	11.64	47.09
04. Jeneponto	0.65	17.90	56.16
05. Takalar	0.10	9.07	43.27
06. Gowa	-	6.58	38.13
07. Sinjai	0.48	5.79	46.02
08. Maros	0.18	7.50	42.96
09. Pangkep	-	2.88	17.35
10. Barru	0.13	6.60	37.87
11. Bone	0.90	4.74	26.70
12. Soppeng	-	2.91	29.56
13. Wajo	0.43	4.62	29.60
14. Sidrap	-	3.79	29.69
15. Pinrang	-	2.65	24.10
16. Enrekang	0.08	4.01	24.28
17. Luwu	0.40	2.00	17.88
18. Tana Toraja	-	6.61	18.95
22. Luwu Utara	0.17	1.94	18.77
25. Luwu Timur	-	6.11	30.53
26. Toraja Utara	-	4.40	27.80
71. Makassar	-	0.40	5.10
72. Pare Pare	-	0.51	10.45
73. Palopo	0.05	1.60	12.53
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>0.20</b>	<b>4.66</b>	<b>26.47</b>

## 5.2. PENDUDUK YANG TIDAK BERSEKOLAH LAGI

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur tersebut

diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program ke arah tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang. Selain itu, dengan melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022–2024. Harapannya tidak ada anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah.

Tabel 8                      Persentase Penduduk Usia 7–18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022

<b>Partisipasi Sekolah</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki + Perempuan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.41	0.27	0.34
2. Masih sekolah	89.88	90.90	90.38
3. Tidak bersekolah lagi	9.71	8.83	9.28

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Dari **Tabel 8** terlihat pada 2022 anak usia 7–18 tahun yang masih duduk di bangku sekolah sudah mencapai 91,01 persen. Hal tersebut berarti sekitar 9 persen sisanya sedang tidak duduk di bangku sekolah. Jika dirinci menurut partisipasi sekolah, terdapat sebanyak 0,34 persen anak usia 7–18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan terdapat sebanyak 9,28 persen anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah lagi (anak tidak sekolah/ATS). Seperti yang dijelaskan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2022–2024, ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, geografis, serta pola layanan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum,

anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Jika ditinjau dari jenis kelamin, pada 2022, anak perempuan usia 7–18 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi dari anak laki–laki, yakni mencapai 90,90 persen. Hal itu berarti, pada 2022, ATS laki–laki lebih tinggi dari ATS perempuan, yakni hampir mencapai angka 2 persen.

**Tabel 9** menyajikan gambaran partisipasi sekolah penduduk 7–18 tahun yang dirinci menurut klasifikasi daerah. Secara total (laki– laki dan perempuan), persentasi anak usia 7–18 tahun di perdesaan yang tidak sekolah lebih tinggi dibandingkan anak usia 7–18 tahun di perkotaan, yakni berturut–turut sebesar 8,55 persen dan 9,89 persen. Hal tersebut menunjukkan masih ada ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Di daerah perdesaan, persentase anak laki–laki usia 7–18 tahun yang tidak sekolah lebih tinggi jika dibandingkan anak perempuan, yakni berturut–turut sebesar 10,98 persen dan 8,67 persen. Selisih persentase keduanya sudah melebihi 2 persen sehingga perlu dijadikan perhatian. Sebaliknya, di perkotaan, persentase anak perempuan usia 7–18 tahun yang tidak sekolah lebih tinggi dari anak laki–laki meskipun ketimpangannya tidak signifikan seperti di perdesaan.

Tabel 9                      Persentase Penduduk Usia 7–18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, Klasifikasi Daerah, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Partisipasi Sekolah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.44	0.24	0.35	0.37	0.29	0.33
2. Masih sekolah	91.28	90.92	91.10	88.71	90.89	89.77
3. Tidak bersekolah lagi	8.28	8.84	8.55	10.92	8.82	9.89
<b>4. Jumlah 1 dan 3</b>	8.72	9.08	8.90	11.29	9.11	10.23

Lanjutan Tabel 9

Partisipasi Sekolah	Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P
(1)	(8)	(9)	(10)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.41	0.27	0.34
2. Masih sekolah	89.88	90.90	90.38
3. Tidak bersekolah lagi	9.71	8.83	9.28
<b>4. Jumlah 1 dan 3</b>	<b>10.12</b>	<b>9.10</b>	<b>9.62</b>

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

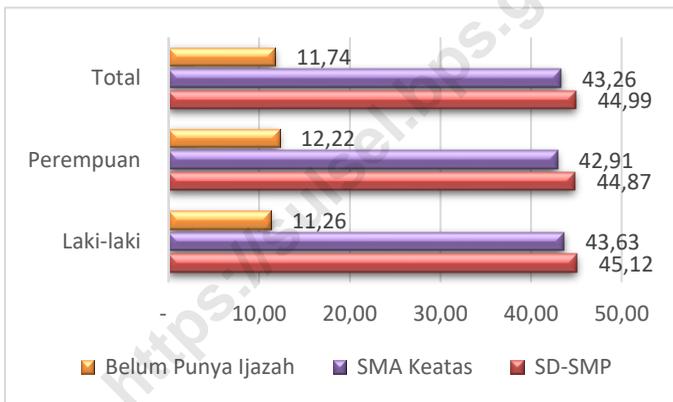
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang mencakup pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu termasuk Program KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah turut melakukan pemerataan layanan pendidikan antarwilayah salah satunya dengan menerapkan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selanjutnya, untuk melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, pemerintah melakukan penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan turut perlu ditingkatkan. (Rancangan Teknokratik RPJMN 2022–2024)

### 5.3. PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan sumber daya manusia. **Gambar 4** menunjukkan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan. Pada 2022, sebagian besar (44,99 persen) penduduk Sulawesi Selatan usia

15 tahun ke atas telah menamatkan jenjang pendidikan dasar, yakni setingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Meskipun demikian, masih ada 11,74 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum memiliki ijazah pada 2022. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan kondisi 2021.

Gambar 4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Jika ditinjau dari jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan dasar tidak terlalu timpang. Namun demikian, persentase penduduk laki-laki yang berhasil menamatkan pendidikan menengah dan tinggi

masih lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Selanjutnya, persentase penduduk perempuan yang belum memiliki ijazah pun masih lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki, yakni sebanyak 12,22 persen. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terjadi. Anak perempuan yang putus sekolah rentan mengalami perkawinan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Harapannya, pada 2025 kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk pendidikan.

<https://sulsel.bps.go.id>



## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### 6.1. JUMLAH SEKOLAH

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. **Tabel 10** menyajikan jumlah sekolah menurut status sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2021/2022. Terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang SD sebanyak 6.451 sekolah, jenjang SMP sebanyak 1.717 sekolah, setingkat SMA sebanyak 612 sekolah, jenjang SMK sebanyak 433 sekolah, dan SLB sebanyak 94 sekolah.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak hanya sebatas pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggara pendidikan jenjang SMK di Sulawesi Selatan didominasi oleh pihak swasta dibanding negeri/pemerintah. Persentase SMK negeri dan SMK swasta pun cukup jauh perbedaannya, yakni 38,8 persen berbanding 61,2 persen. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK), persentase jumlah sekolah setingkat SMA dan setingkat SMK tidak terlalu berbeda jauh, yakni 57,26 persen (580 sekolah) berbanding 42,74 persen (433 sekolah). Jumlah sekolah setingkat SMK yang cukup bersaing dengan SMA diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan sebagai sarana tercipta sumber daya manusia yang siap bekerja secara profesional di bidangnya. Harapannya terjadi kemajuan maksimal antara laju pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Tabel 10 Jumlah Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Status Sekolah, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022

Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kota Makassar	314	159	473	56	169	225	24	114	138
Kab. Bone	665	10	675	114	10	124	30	8	38
Kab. Gowa	400	22	422	83	36	119	22	28	50
Kab. Bulukumba	348	2	350	63	6	69	19	2	21
Kab. Wajo	375	14	389	70	4	74	15	5	20
Kab. Jeneponto	285	4	289	64	13	77	14	10	24
Kab. Pangkajene Kepulauan	300	5	305	78	15	93	24	9	33
Kab. Luwu	264	13	277	80	28	108	19	6	25
Kab. Pinrang	315	13	328	52	6	58	11	4	15
Kab. Maros	223	21	244	43	32	75	14	20	34
Kab. Sinjai	239	6	245	40	4	44	14	3	17
Kab. Takalar	234	5	239	37	8	45	13	12	25
Kab. Tana Toraja	210	10	220	63	19	82	13	5	18
Kab. Sidenreng Rappang	229	8	237	44	7	51	11	5	16
Kab. Luwu Utara	245	5	250	73	3	76	19	0	19
Kab. Enrekang	219	5	224	40	6	46	12	6	18
Kab. Barru	197	2	199	35	5	40	6	2	8
Kab. Toraja Utara	184	8	192	65	12	77	11	6	17
Kab. Soppeng	250	4	254	31	7	38	8	4	12
Kab. Luwu Timur	158	15	173	36	14	50	13	8	21
Kab. Kepulauan Selayar	139	3	142	49	6	55	9	2	11
Kab. Bantaeng	147	3	150	25	18	43	6	2	8
Kota Palopo	65	16	81	14	11	25	6	8	14
Kota Parepare	80	13	93	13	10	23	5	5	10
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>6.085</b>	<b>366</b>	<b>6.451</b>	<b>1.268</b>	<b>449</b>	<b>1.717</b>	<b>338</b>	<b>274</b>	<b>612</b>

Lanjutan Tabel 10

Kabupaten/Kota	SMK			SLB		
	N	S	J	N	S	J
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kota Makassar	13	70	83	2	20	22
Kab. Bone	9	15	24	1	8	9
Kab. Gowa	5	17	22	1	5	6
Kab. Bulukumba	11	7	18	1	1	2
Kab. Wajo	9	5	14	1	1	2
Kab. Jeneponto	10	11	21	2	2	4
Kab. Pangkajene Kepulauan	9	5	14	1	1	2
Kab. Luwu	13	12	25	0	3	3
Kab. Pinrang	10	8	18	1	0	1
Kab. Maros	2	16	18	1	3	4
Kab. Sinjai	4	6	10	1	1	2
Kab. Takalar	7	3	10	2	7	9
Kab. Tana Toraja	4	23	27	1	3	4
Kab. Sidenreng Rappang	8	4	12	1	0	1
Kab. Luwu Utara	8	6	14	0	3	3
Kab. Enrekang	6	4	10	1	0	1
Kab. Barru	5	3	8	1	0	1
Kab. Toraja Utara	5	17	22	0	1	1
Kab. Soppeng	5	5	10	1	6	7
Kab. Luwu Timur	2	2	4	0	3	3
Kab. Kepulauan Selayar	8	0	8	1	0	1
Kab. Bantaeng	5	7	12	1	1	2
Kota Palopo	7	10	17	1	1	2
Kota Parepare	3	9	12	1	1	2
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>168</b>	<b>265</b>	<b>433</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>94</b>

Catatan: N = Negeri  
S = Swasta  
J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

## 6.2. JUMLAH GURU

**Tabel 11** menyajikan jumlah pendidik/guru menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2021/2022. Jumlah guru sebanding dengan jumlah sekolah. Tingginya jumlah sekolah memengaruhi jumlah tenaga pendidik di dalamnya. Jumlah guru SD terbanyak berada di Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Gowa sesuai dengan jumlah sekolah jenjang SD yang dimiliki. Namun demikian, Kabupaten Bone memiliki jumlah SD terbanyak tetapi jumlah gurunya masih jauh di bawah Kota Makassar, yakni 5.123 orang dibanding 7.372 orang. Selanjutnya, jumlah guru SMP di Sulawesi Selatan sebanyak 28.330 orang. Kota Makassar memiliki jumlah guru SMP tertinggi, yakni sebanyak 3.694 orang.

Pada tahun ajaran 2021/2022, terdapat sebanyak 15.501 guru SMA dan 10.097 guru SMK. Wilayah yang memiliki jumlah guru sekolah jenjang menengah adalah Kota Makassar dengan 2.410 guru SMA/MA dan 1.625 guru SMK. Hal tersebut sebanding dengan jumlah sekolah jenjang menengah di Kota Makassar.

Jika dilihat menurut jenis kelamin untuk semua status sekolah, jumlah guru perempuan selalu lebih tinggi dibanding jumlah guru laki-laki. Guru SD perempuan di Sulawesi Selatan jumlahnya mencapai tiga kali lipat jumlah guru SD laki-laki, yakni 49.062 orang dibanding 14.696 orang. Selanjutnya, jenjang pendidikan dengan selisih guru perempuan dan laki-laki terendah adalah jenjang SMK. Terdapat 62,13 persen guru SMK perempuan (6.274 orang) dan 37,87 persen guru SMK laki-laki (3.823 orang).

Tabel 11 Jumlah Guru menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022

Kabupaten/Kota	Total	SD			SMP		
		L	P	J	L	P	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Makassar	13 272	1.651	5.721	7.372	1.141	2.553	3.694
Kab. Bone	8 820	1.103	4.020	5.123	576	1.303	1.879
Kab. Gowa	7 001	941	3.338	4.279	582	1.366	1.948
Kab. Bulukumba	2 460	758	2.342	3.1	369	843	1.212
Kab. Wajo	5 349	692	2.032	2.724	455	1.037	1.492
Kab. Jeneponto	5 404	458	2.238	2.696	395	997	1.392
Kab. Pangkajene Kepulauan	5 268	628	2.338	2.966	387	851	1.238
Kab. Luwu	5 059	763	2.079	2.842	367	789	1.156
Kab. Pinrang	4 722	662	2.227	2.889	304	702	1.006
Kab. Maros	4 485	488	1.854	2.342	281	758	1.039
Kab. Sinjai	3 462	544	1.785	2.329	316	704	1.02
Kab. Takalar	4 548	602	1.726	2.328	357	842	1.199
Kab. Tana Toraja	4 065	613	1.776	2.389	287	577	864
Kab. Sidenreng Rappang	3 921	583	1.645	2.228	319	558	877
Kab. Luwu Utara	3 136	504	1.524	2.028	418	822	1.24
Kab. Enrekang	4 133	522	1.486	2.008	397	698	1.095
Kab. Barru	3 665	450	1.572	2.022	301	574	875
Kab. Toraja Utara	3 778	517	1.802	2.319	208	522	730
Kab. Soppeng	3 649	435	1.599	2.034	340	583	923
Kab. Luwu Timur	3 382	514	1.544	2.058	222	503	725
Kab. Kepulauan Selayar	3 064	436	1.373	1.809	228	494	722
Kab. Bantaeng	3 139	432	1.255	1.687	254	608	862
Kota Palopo	2 578	169	929	1.098	169	449	618
Kota Parepare	2 220	231	857	1.088	162	362	524
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>93 336</b>	<b>14 696</b>	<b>49 062</b>	<b>63 758</b>	<b>8 835</b>	<b>19 495</b>	<b>28 330</b>

Lanjutan Tabel 11

Kabupaten/Kota	SMA			SMK			SLB		
	L	P	J	L	P	J	L	P	J
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kota Makassar	871	1.539	2.410	651	974	1.625	93	247	340
Kab. Bone	420	825	1.245	172	323	495	15	63	78
Kab. Gowa	359	731	1.09	209	375	584	23	58	81
Kab. Bulukumba	270	487	757	151	250	401	10	49	59
Kab. Wajo	255	416	671	133	293	426	8	28	36
Kab. Jeneponto	226	540	766	165	355	520	0	30	30
Kab. Pangkajene Kepulauan	170	305	475	224	352	576	4	9	13
Kab. Luwu	208	384	592	155	259	414	17	38	55
Kab. Pinrang	180	324	504	117	176	293	6	24	30
Kab. Maros	206	472	678	130	224	354	16	56	72
Kab. Sinjai	256	461	717	102	181	283	10	21	31
Kab. Takalar	227	421	648	121	237	358	4	11	15
Kab. Tana Toraja	183	373	556	65	154	219	10	27	37
Kab. Sidenreng Rappang	194	334	528	106	169	275	5	8	13
Kab. Luwu Utara	170	301	471	237	269	506	0	7	7
Kab. Enrekang	176	358	534	203	263	466	5	25	30
Kab. Barru	169	247	416	135	196	331	6	15	21
Kab. Toraja Utara	116	206	322	120	228	348	15	44	59
Kab. Soppeng	200	364	564	44	69	113	2	13	15
Kab. Luwu Timur	114	171	285	89	202	291	3	20	23
Kab. Kepulauan Selayar	109	164	273	86	146	232	3	25	28
Kab. Bantaeng	105	218	323	85	164	249	3	15	18
Kota Palopo	150	254	404	188	233	421	8	29	37
Kota Parepare	102	170	272	135	182	317	7	12	19
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>5 436</b>	<b>10 065</b>	<b>15 501</b>	<b>3 823</b>	<b>6 274</b>	<b>10 097</b>	<b>273</b>	<b>874</b>	<b>1 147</b>

Catatan: L = Laki-Laki  
P = Perempuan  
J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

### 6.3. JUMLAH MURID

**Tabel 12** menyajikan jumlah murid/siswa menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2021/2022. Secara total, terdapat 1.570.647 murid yang bersekolah di jenjang SD sampai SMK (termasuk SLB) di Sulawesi Selatan pada tahun ajaran 2021/2022. Jika dibandingkan, 51,08 persen dari total murid merupakan murid laki-laki dan 48,92 persen sisanya merupakan murid perempuan. Selisih persentase di antara keduanya dapat terbilang rendah, yakni sekitar 2,16 persen. Namun demikian, jika dilihat secara jumlah, selisih di antara keduanya sebanyak 33.791 murid. Artinya, murid laki-laki lebih banyak 33.791 orang dibanding murid perempuan. Kabupaten/kota yang memiliki murid bersekolah di jenjang SD sampai SMK (termasuk SLB) tertinggi adalah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone. Hal tersebut sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di 3 kabupaten/kota tersebut (jumlahnya terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan).

Pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), jumlah murid laki lebih banyak dibanding murid perempuan. Hal tersebut berkebalikan dengan komposisi murid pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK). Jumlah murid laki-laki yang duduk di bangku sekolah menengah sebanyak 175.029 orang. Sedangkan terdapat 177.299 murid perempuan yang duduk di bangku sekolah menengah. Jika dirinci lebih dalam, baik jumlah murid laki-laki maupun jumlah murid perempuan yang duduk di bangku SMA lebih banyak daripada yang duduk di bangku SMK. Selanjutnya, murid perempuan di SMA lebih tinggi jika dibandingkan dengan murid laki-laki, yakni sebesar 126.478 orang dan 102.377 orang. Terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih berminat untuk sekolah di jenjang SMK daripada penduduk perempuan.

Tabel 12.1. Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki					
	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Makassar	69 055	30 399	18 943	13 261	912	132 570
Kab. Bone	38 685	14 173	7 696	5 365	254	66 173
Kab. Gowa	35 504	10 886	8 646	2 971	203	58 210
Kab. Bulukumba	22 229	6 356	485	1 955	86	31 111
Kab. Wajo	2 213	7 666	4 857	1 851	118	16 705
Kab. Jeneponto	19 429	7 193	5 298	3 822	76	35 818
Kab. Pangkajene Kepulauan	21 236	6 455	3 232	3 944	22	34 889
Kab. Luwu	20 272	6 212	3 813	2 411	86	32 794
Kab. Pinrang	19 015	7 243	3 558	3 078	97	32 991
Kab. Maros	16 335	655	4 335	2 421	150	23 896
Kab. Sinjai	18 453	5 123	337	1 564	72	25 549
Kab. Takalar	16 456	6 113	4 954	1 199	60	28 782
Kab. Tana Toraja	15 819	7 927	2 469	5 453	27	31 695
Kab. Sidenreng Rappang	15 002	5 829	3 943	242	69	25 085
Kab. Luwu Utara	1 406	7 334	2 575	5 355	100	16 770
Kab. Enrekang	15 784	4 953	2 387	1 654	24	24 802
Kab. Barru	12 279	4 631	3 335	786	71	21 102
Kab. Toraja Utara	11 467	4 328	3 323	1 958	18	21 094
Kab. Soppeng	9 968	2 963	1 617	1 312	53	15 913
Kab. Luwu Timur	8 664	3 472	1 651	1 612	48	15 447
Kab. Kepulauan Selayar	9 057	3 944	2 457	3 057	104	18 619
Kab. Bantaeng	9 775	3 365	1 731	1 984	132	16 987
Kota Palopo	6 831	2 922	1 714	960	35	12 462
Kota Parepare	7 769	2 997	1 623	2 259	65	14 713
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>455 274</b>	<b>169 034</b>	<b>102 377</b>	<b>72 652</b>	<b>2 882</b>	<b>802 219</b>

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Tabel 12.2. Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022

Kabupaten/Kota	Perempuan					
	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Makassar	64 961	29 501	20 885	11 423	557	127 327
Kab. Bone	35 793	13 967	8 876	4 229	177	63 042
Kab. Gowa	33 371	11 349	9 917	2 269	120	57 026
Kab. Bulukumba	2 043	6 689	595	1 566	64	10 957
Kab. Wajo	20 201	7 826	5 644	1 288	65	35 024
Kab. Jeneponto	17 913	6 682	6 231	2 106	86	33 018
Kab. Pangkajene Kepulauan	19 601	6 794	442	2 927	20	29 784
Kab. Luwu	19 088	6 186	429	2 349	52	28 104
Kab. Pinrang	17 844	7 066	4 643	213	48	29 814
Kab. Maros	15 308	6 284	5 155	175	97	27 019
Kab. Sinjai	17 439	5 212	4 111	1 086	40	27 888
Kab. Takalar	15 162	5 869	5 582	705	42	27 360
Kab. Tana Toraja	14 024	7 172	5 035	2 608	22	28 861
Kab. Sidenreng Rappang	13 983	558	4 871	1 553	41	21 006
Kab. Luwu Utara	12 361	6 534	5 009	1 938	67	25 909
Kab. Enrekang	15 152	4 887	3 297	129	31	23 496
Kab. Barru	11 053	4 359	3 788	844	38	20 082
Kab. Toraja Utara	10 629	3 783	417	996	16	15 841
Kab. Soppeng	9 386	3 327	2 053	1 282	25	16 073
Kab. Luwu Timur	8 205	3 453	2 107	1 158	19	14 942
Kab. Kepulauan Selayar	8 528	4 089	3 692	1 465	64	17 838
Kab. Bantaeng	9 198	3 421	2 444	1 338	82	16 483
Kota Palopo	6 243	2 956	2 013	996	18	12 226
Kota Parepare	7 376	3 065	2 295	1 525	38	14 299
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>423 249</b>	<b>166 051</b>	<b>126 478</b>	<b>50 821</b>	<b>1 829</b>	<b>768 428</b>

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Tabel 12.3. Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki + Perempuan					
	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Makassar	134 016	599	39 828	24 684	1 469	200 596
Kab. Bone	74 478	2 814	16 572	9 594	431	103 889
Kab. Gowa	68 875	22 235	18 563	524	323	110 520
Kab. Bulukumba	42 659	13 045	108	3 521	150	59 483
Kab. Wajo	42 331	15 492	10 501	3 139	183	71 646
Kab. Jeneponto	37 342	13 875	11 529	5 928	162	68 836
Kab. Pangkajene Kepulauan	40 837	13 249	7 652	6 871	42	68 651
Kab. Luwu	3 936	12 398	8 103	476	138	25 051
Kab. Pinrang	36 859	14 309	8 201	5 208	145	64 722
Kab. Maros	31 643	12 834	949	4 171	247	49 844
Kab. Sinjai	35 892	10 335	7 481	265	112	54 085
Kab. Takalar	31 618	11 982	10 536	1 904	102	56 142
Kab. Tana Toraja	29 843	15 099	7 504	8 061	49	60 556
Kab. Sidenreng Rappang	28 985	11 409	8 814	3 973	110	53 291
Kab. Luwu Utara	26 421	13 868	7 584	7 293	167	55 333
Kab. Enrekang	30 936	984	5 684	2 944	55	40 603
Kab. Barru	23 332	899	7 123	163	109	31 626
Kab. Toraja Utara	22 096	8 111	7 493	2 954	34	40 688
Kab. Soppeng	19 354	629	367	2 594	78	23 022
Kab. Luwu Timur	16 869	6 925	3 758	277	67	27 896
Kab. Kepulauan Selayar	17 585	8 033	6 149	4 522	168	36 457
Kab. Bantaeng	18 973	6 786	4 175	3 322	214	33 470
Kota Palopo	13 074	5 878	3 727	1 956	53	24 688
Kota Parepare	15 145	6 062	3 918	3 784	103	29 012
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>878 523</b>	<b>335 085</b>	<b>228 855</b>	<b>123 473</b>	<b>4 711</b>	<b>1 570 647</b>

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

#### 6.4. RASIO MURID TERHADAP ROMBONGAN BELAJAR DAN GURU

Jumlah rombongan belajar (rombel) dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk menetapkan jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh setiap guru pada satuan pendidikan tersebut. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyebutkan bahwa pada jenjang SD, satu rombel layaknya mencakup 20–28 peserta didik (murid). Sementara itu, pada jenjang SMP setidaknya terdiri dari 20–32 murid dalam satu rombel. Selanjutnya, jenjang SMA mencakup 20–36 murid dalam satu rombel dan sebanyak 15–36 murid yang dicakup dalam satu rombel untuk jenjang SMK.

Tabel 13. Jumlah dan Rasio Murid dan Rombongan Belajar menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Murid per Rombel
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	878 523	46351	18.95
SMP	335 085	12788	26.20
SMA	228 855	7583	30.18
SMK	123 473	5270	23.43

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan dalam **Tabel 13**, terlihat bahwa sebagian besar jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tersebut. Jenjang pendidikan tersebut adalah

SMP, SMA, dan SMK. Namun demikian, rasio murid per rombel untuk jenjang SD masih di bawah ketentuan yang ada. Harapannya, murid SD akan semakin bertambah mengingat ketersediaan rombel setingkat SD di Sulawesi Selatan cukup banyak.

Kualitas dan distribusi guru yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan sektor pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid–guru. Angka tersebut menggambarkan rata–rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio tersebut di suatu sekolah, semakin berkurang efektivitas proses belajar mengajar. Hal tersebut terjadi karena pengawasan dan perhatian guru terhadap murid cenderung berkurang sehingga kualitas pengajaran akan semakin rendah.

Tabel 14. Jumlah dan Rasio Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2021/2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid per Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	878 523	63 758	13
SMP	335 085	2 833	11
SMA	228 855	15 501	14
SMK	123 473	10 097	12

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022 (diolah)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 murid. Sedangkan, seorang guru pada jenjang SMK idealnya bertanggung jawab atas 15 murid. **Tabel 14** menyajikan data rasio murid–guru. Dari tabel tersebut terlihat rasio murid–guru jenjang SD sampai SMA di Sulawesi

Selatan cukup jauh berada di bawah standar ideal yang sudah ditetapkan. Hal serupa juga terjadi pada jenjang SMK meskipun selisih rasio murid–guru dengan nilai ideal yang ditetapkan tidak terlalu tinggi.

Meskipun demikian, rasio murid–guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Idealitas rasio tersebut akan bergantung kepada beberapa faktor. Rasio murid–guru di kelas akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar mengajar di kelas. Namun, hal tersebut bukanlah satu–satunya indikator penentu kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan.

Salah satu cara meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, dapat juga dengan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru, yakni S1 /DIV dan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik.



## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1. KESIMPULAN

Dari hasil kajian data Susenas 2022 sebelumnya dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (5–6 tahun) pada 2022 di Sulawesi Selatan baru mencapai 21,66 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu terutama di beberapa kabupaten yang capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Provinsi Sulawesi Selatan, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.
3. Hingga tahun 2022 masih terdapat 6,69 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf/ tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana di Sulawesi Selatan. Jika dirinci menurut kelompok umur, masih terdapat 4,66 persen penduduk usia 25–29 tahun dan 0,20 persen penduduk usia 15–24 tahun yang buta huruf.

4. Di Sulawesi Selatan, terdapat 9,62 persen anak usia 7–18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Jika dilihat dari klasifikasi wilayah, persentase anak usia 7–18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.
5. Pada 2022, masih terdapat 11,74 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum punya ijazah di Sulawesi Selatan. Persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang belum punya ijazah lebih tinggi dibanding laki–laki usia 15 tahun ke atas yang belum punya ijazah.
6. Jumlah guru di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2021/2022 didominasi oleh perempuan. Jumlah guru terbanyak ada pada jenjang SD/MI, sebanding dengan jumlah sekolah pada jenjang tersebut.
7. Pada Tahun Ajaran 2019/2022 di Sulawesi Selatan, jumlah murid perempuan yang duduk di bangku SMA/MA lebih tinggi dibandingkan jumlah murid laki–laki pada jenjang yang sama.
8. Jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2019/2022 sudah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Namun demikian, rasio murid per rombel untuk jenjang SD masih di bawah ketentuan yang ada.
9. Rasio murid–guru di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2019/2022 masih berada di bawah standar ideal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonisoyal Daptif Kolaboratif

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Haji Bau No. 6 Makassar 90125  
Telp. (0411) 854838 Fax: (0411) 851225  
Homepage: <https://sulsel.bps.go.id>  
Email: [bps7300@bps.go.id](mailto:bps7300@bps.go.id)

ISBN 978-623-6203-05-7



9 786236 203057